

IKHTISAR LHKPN a.n KISEY BINA HABEAHAN (Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2023) NIK 1215026312890001

1. DATA PRIBADI

 Nama
 : KISEY BINA HABEAHAN

 NIK
 : 1215026312890001

 No KK
 : 1215022603081278

 NPWP
 : 730387479128000

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : SUKARAMAI/23 Desember 1989

Status Nikah : Menikah Agama : KATOLIK

Alamat : DESA PARPULUNGEN KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA, KECAMATAN KERAJAAN,

PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA

Nomor Handphone : 085296622089

Email : kiseybina23@gmail.com

NHK : 792690 Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA - BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA - BADAN

STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Tanggal Lapor : 31 Desember 2023
Tanggal Kirim : 9 Februari 2024
Status : Proses Verifikasi





2. DATA KELUARGA

N	0	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
:	1 JATAI	MBOR MANURUNG	SUAMI	SILOMARIAH , 26 Juli 1990 / Laki- Laki	WIRASWASTA	HUTA II SILOMARIAH, DESA SARIBU ASIH, KECAMATAN HATONDUHAN, KABUPATEN SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA

3. JABATAN

N	NO JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
	1 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEMENTERIAN PERTANIAN	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

4. DATA HARTA

4.1.TANAH / BANGUNAN

N O	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
_	Sub Total				Rp. 0	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI	Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000	UBAH
	Model: NC11B3CA/T	Atas Nama: LAINNYA (SLAMET			
	Tahun Pembuatan : 2012	HARTANTO)			





NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
	No. Pol. / Registrasi : DG2575LA	Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: SLAMET HARTANTO Tahun Perolehan: 2018			
	Sub Total			Rp. 3.500.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
		Sub Total		Rp. 0	

4.4. SURAT BERHARGA

N O	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
			Sub Total		Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : MANDIRI	Nomor : 1500011147731 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 110.000.000	UBAH
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BRI	Nomor : 160501003907503 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 200.000	UBAH





NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
3	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BNI	Nomor : 0387693447 Atas Nama : PASANGAN/ANAK (JATAMBOR MANURUNG)	HASIL SENDIRI	Rp. 25.000.000	UBAH
		Rp. 135.200.000			

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGA N
		Sub Total		Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
			Sub Total	Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 101.726.737	Rp. 25.000.000
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0







NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 101.726.737	Rp. 25.000.000

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
_	Sub Total	Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA





NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 60.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 200.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 60.200.000





6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 10.000.000
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 10.000.000

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 9.540.000
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 9.540.000

7. LAMPIRAN FASILITAS







NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
1	Jenis : RUMAH DINAS Keterangan : Mess Tempat Tinggal	BPSIP Maluku Utara	Mess Tempat Tinggal
2	Jenis : FASILITAS LAINNYA Keterangan : Kendaraan Roda Dua	BPSIP Maluku Utara	Kendaraan Roda Dua

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 138.700.000	Rp. 0	Rp. 138.700.000

Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.